BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. Laporan pertanggungjawaban manager atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank dan lembaga keuangan) maupun pihak yang berkepentingan lainnya (Halini, 2012).

Fahmi (2017: 22) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Sedangkan Munawir (2002: 56) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang

bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi pengguna *(users)* untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan. Pengukuran kinerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu kinerja non keuangan dan pengukuran kinerja keuangan. Kinerja non keuangan adalah faktor kualitatif yang mendukung kinerja keuangan yang bersifat kuantitatif. Pengukuran kinerja keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi dan pelaksanaan strategis (Wijayanti, 2012).

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Sucipto (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Dapat diartikan pula sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan perbuatan dalam situasi tertentu,

dimana setiap sumberdaya manusia yang dimiliki oleh perusahaan (Triwinasis, 2013).

Kinerja keuangan diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut, Sawir (2005:6) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah penilaian kondisi keuangan yang menjadi prestasi perusahaan yang memerlukan analisis dengan beberapa tolok ukur seperti rasio dan indeks sehingga dua data keuangan bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Mulyadi (2007:2) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawan secara periodik berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan dapat digambarkan sebagai kondisi perusahaan yang memiliki posisi keuangan serta hasil yang telah dicapai perusahaan dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi/perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misinya. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan ROA *(Return on Assets).* ROA dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2.1.3 *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan *(hard definition),* maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri *(soft definition).*

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit *(shareholder)* dan perspektif yang luas *(stakeholders),* namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan/menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan dan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan investor, serta bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan biaya keagenan (Rahmawati, 2012: 169).

FCGI *(forum corporate governance Indonesia)* mendefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) (2004), mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan *(disclosure)* semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Triwinasis, 2013).

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa *good corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor,

baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.Komponen GCG dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Halini, 2012).

Kusmayadi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Lembaga institusi memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar terhadap perusahaan. Dengan adanya investor institusional kinerja manajemen serta keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dimonitor atau diawasi. Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham

dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing.

Haryono (2005), pada umumnya pemegang saham institusional memiliki proporsi kepemilikan yang tinggi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan dimana institusi yang memiliki saham-saham diperusahaan lainnya.

Kepemilikan institusional memiliki memiliki peranan besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{K. Instutional} = \frac{\text{Jumlah saham pihak institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

b. Dewan Komisaris

Halini (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada direktur perseroan terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas didefinisikan sebagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG.

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari

satu orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan (Kusmayadi, 2019).

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan berwenang secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan GCG pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi. Kinerja dewan komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun secara mandiri oleh dewan komisaris. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada setiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja dewan komisaris disampaikan dalam RUPS. Anggota dewan komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE03/PM/2000 dimana jumlah anggota dewan komisaris saat ini adalah 7 orang dengan 3 orang diantaranya dengan 43% adalah komisaris independen (Syaifuddin, 2009).

Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai primus interpares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
b) Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator seluruh jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

   Rumus : DK = Jumlah anggota dewan komisaris

c. Dewan Direksi

Rizky (2016) menyatakan bahwa dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dewan direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai apa aja yang diinginkan oleh dewan. Dewan direksi merupakan orang yang dipilih guna memimpin dan mengelola perseroan terbatas (PT). Direktur dapat dikatakan seseorang yang mempunyai perusahaan tersebut atau orang profesional yang dipilih oleh prinsipal untuk menjalankan serta memimpin perusahaan. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur atau dewan eksekutif.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (Kusmayadi, 2019).

a. Kepengurusan

Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.

b. Manajemen Risiko

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.

c. Pengendalian Internal

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan. Untuk itu perusahaan harus memiliki sistem pengendalian termasuk auditor internal dan auditor eksternal.

d. Komunikasi

Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

e. Tanggungjawab Sosial

Guna memperoleh pengakuan dari masyarakat atas keberadaan perusahaan, direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility),* Direksi juga harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di Indonesia penetapan pada direktur tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi. Jumlah dan komposisi direksi dalam peraturan OJK No 55/F.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, antara lain :

1) Bank wajib memiliki anggota direksi dengan jumlah paling sedikit 3 orang.
2) Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3) Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur dan direktur utama.

Dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator seluruh jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan.

Rumus : DD = Jumlah anggota dewan direksi

d. Komite Audit

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan

dan pengungkapan. Keberadaannya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam kerangka dasar *corporate governance,* implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* tergantung atas tiga pilar penting yaitu internal control yang kuat, audit internal yang independen dan audit eksternal yang memberikan *feedback* terhadap efektivitas dari proses internal control yang ada didalam perusahaan (Wijayanti, 2012).

Halini (2012) menyatakan bahwa Komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya, sehingga akan mengurangi terjadinya masalah keagenan didalam perusahaan. Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi, tranparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Berdasarkan Surat Edaran dari direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12/2001 tanggal 7 Desember 2001 serta pedoman pembentukan komite audit menurut BAPEPAM perihal keanggotan komite audit disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk ketua komite audit.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komite audit,

perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan/hal yang disampaikan oleh direksi. Untuk itu, komite audit harus melakukan penelaahan atas informasi keuangan, proyeksi/informasi keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya , komite audit minimal mengadakan pertemuan 4 kali dalam setahun (Triwinasis, 2013).

Rumus : Audit Meeting = Jumlah frekuensi rapat dalam 1 tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang kinerja keuangan yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen akan dicantumkan dari hasil penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yaitu :

Halini (2012) meneliti tentang pengaruh *good corporategovernance* terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2011. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan dewan komisaris terhadap rasio ROA, secara keseluruhan, *good corporate governance* berpengaruh simultan terhadap rasio ROA.

Lenny dan Lusmeida meneliti tentang pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan BOPO dipengaruhi oleh variabel independen sedangkan tiga variabel dependen sisanya yaitu ROE, NIM, CAR tidak dipengaruhi. Koefisien determinasi menunjukkan penerapan prinsip-

prinsip *good corporate governance* juga memiliki pengaruh yang tidak begitu besar terhadap kinerja perusahaan, yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Peneliti lain seperti Triwinasis (2013) meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA), hal ini berarti bahwa kinerja keuangan (CFROA) akan meningkat jika variabel independen tersebut juga ditingkatkan.

Rizky (2016) meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sedangkan Wijayanti (2012) meneliti tentang pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Dalam penelitian tersebut digunakan struktur *corporate governance* berupa kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan

direksi, aktivitas (rapat) dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Mirawati Halini (2012)	Pengaruh GCG terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada Periode 2009-2011.	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit. Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Variabel Independen Berpengaruh terhadap Variabel Dependen.
2	Lenny dan Herlina Lusmeida	Pengaruh Penerapan GCG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.	Variabel Independen : Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit. Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Variabel Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Tidak Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
3	Candra Rifqi Triwinasis (2013)	Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit. Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Variabel Independen Berpengaruh pada Variabel Dependen.
4	Rizky Reza Sulton (2016)	Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2011-	Variabel Independen : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional.	(1)Variabel Dewan Komisaris tidak Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan (2)Variabel

		2014.		Direksi Berpengaruh Positif pada Kinerja Keuangan. (3)Variabel Kepemilikan Manajerial Tidak Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan. (4)Variabel Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan.
5	Sri Wijayanti (2012)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Variabel Dependen : Kinerja Keuangan.	Variabel Independen Tidak Berpengaruh Positif terhadap Variabel Dependen.

Sumber : diolah peneliti 2020

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka konseptual merupakan suatu metode yang menjelaskan bagaimana hubungan dengan faktor-faktor yang penting yang mencerminkan keterkaitannya antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk menyelesaikan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Kerangka

konseptual dalam hal ini akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian, yakni variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan suatu hubungan variabel melalui suatu kerangka konseptual penelitian dalam bagan berikut :

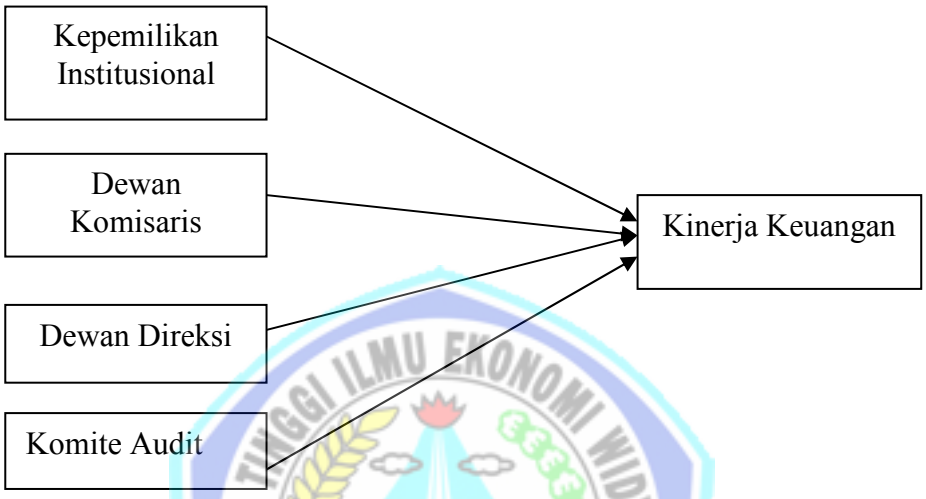

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Sumber : Diolah peneliti 2020.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti kemudian rumusan jawaban sementara diuji terlebih dahulu, untuk membuktikan kebenarannya sesuai fakta yang didapat oleh peneliti. Maka berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan sementara hipotesis sebagai berikut :

a. Hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan

Kepemilikan institusional memiliki hubungan terhadap kinerja keuangan, karena jika suatu perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham yang tinggi maka dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya

kepemilikan dari pihak institusional maka dapat mengurangi adanya konflik kepentingan dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan Halini (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan Triwinasis (2013) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan

b. Hubungan dewan komisaris dengan kinerja keuangan

Peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan yaitu melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, maka jumlah keanggotaan dewan komisaris dapat memberikan pengawasan terhadap hasil dari proses operasional perusahaan sehingga akan memungkinkan terjadi peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut didukung oleh Wijayanti (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan :

H2 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan

c. Hubungan dewan direksi dengan kinerja keuangan

Peran dewan direksi adalah menyusun kebijakan terhadap operasional perusahaan. Dengan jumlah yang relatif besar, maka keputusan yang diambil oleh direksi tidaklah terfokus pada satu pihak saja. Jumlah direksi yang banyak

umumnya direalisasikan pada penempatan setiap direksi pada bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh setiap manajer sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus sehingga kinerja keuangan suatu perusahaan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2012) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2016) menunjukkan bahwa dewan direksi juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian teori dan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan :

H3 : Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

d. Hubungan komite audit dengan kinerja keuangan

Komite audit memegang peranan penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perbankan diharapkan dapat selalu mempertahankan atau meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip *corporate governance.*

Penelitian yang dilakukan oleh Triwinasis (2013) menunjukkan bahwa komite audit secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halini (2012) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian teori dan penelitian terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan :

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan